



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 25 Februari 2013

Halaman: 15

PENERAPAN KURIKULUM BARU DI KOTA YOGYA Ditopang APBD, Tak Ada Sekolah yang Luput

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat hanya mengalokasikan 30% Sekolah Dasar (SD) di setiap daerah untuk pelaksanaan Kurikulum Pendidikan 2013. Sementara bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), bisa dilakukan secara menyeluruh. Namun demikian, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta memastikan tidak ada sekolah di wilayahnya yang luput.

Kepala Disdik Kota Yogyakarta Edy Heri Suasana mengatakan, pihaknya kini tengah memetakan anggaran dalam APBD 2013 untuk menopang penerapan kurikulum baru tersebut. "Pusat memang hanya membantu 30% untuk SD. Tetapi, Kota Yogya siap 100%. Sisanya akan kami tanggung melalui keuangan daerah," ungkapnya, Minggu (24/2). Namun demikian, Edy juga

belum mengetahui secara detail kebutuhan anggaran untuk menopang penerapan kurikulum tersebut. Dari total 178 SD negeri dan swasta di Kota Yogyakarta, dipastikan hanya sekitar 53 sekolah yang ditanggung oleh pusat. Sedangkan 125 sekolah menjadi tanggung jawab instansinya.

Dana yang dibutuhkan tersebut meliputi pelatihan guru kelas serta pengadaan buku

pelajaran. Edy memastikan, pihaknya masih cukup mampu untuk mengatasi kekurangan dana tersebut. Antara lain dengan penggunaan sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2010. "Kebetulan kami masih memiliki sisa DAK Pendidikan 2010 sekitar Rp 700 juta. Peruntukan dana itu juga untuk membeli buku sehingga bisa dialihkan, ke sana," imbuhnya. Selain itu, pada 2013 ini pe-

merintah juga akan memberikan DAK Pendidikan bagi seluruh daerah untuk menunjang pemberlakuan kurikulum baru. Kendati masih akan diterima pada APBD Perubahan, namun untuk menalangnya akan dilakukan dengan pengalihan anggaran. Kode rekening anggaran yang bisa dialihkan pun tengah dicermati dinas.

Terkait kekurangan guru SD, menurut Edy, juga sudah dipikirkan oleh dinas. Tahun ini diprediksi ada kekurangan 135 guru karena masa pensiun. Akan tetapi, pihaknya sudah melakukan pemetaan serta memprioritaskan pengangkatan. "Kalau nanti semua sekolah bisa diterapkan

bersamaan, maka akan lebih optimal," tandasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Kadamanto Baskara Aji juga memastikan, penerapan kurikulum SD di DIY bisa di atas 30% atau melebihi dari tanggungan pemerintah pusat. Namun demikian, pihaknya perlu melakukan koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di DIY.

"Dalam waktu dekat, kami semua akan duduk bersama. Yang pasti, di atas 30%. Makanya, kami perlu mengetahui bagaimana kemampuan daerah masing-masing," paparnya. (R-9)-s

Instansi	Tindak Lanjut
1.	☐ Untuk Ditanggapi
2.	☒ Untuk Diketahui

☒ Positif ☐ Segera

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005